



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA BEKASI  
**UNIT KERJA** : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : LUSI SILAWATI
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 717546

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.850.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
2. Tanah Seluas 6.630 m2 di KAB / KOTA CIREBON, WARISAN Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/78 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 775.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/84 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 460.500.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKKAR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
4. LAINNYA, SEPEDA BROMPTON SEPEDA LIPAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 200.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	876.115.279
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.386.615.279
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.386.615.279

---

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.